

Daftar Isi
Jurnal **Masyarakat dan Budaya**
Volume 18 No. 3 Tahun 2016

	Halaman
Pengantar Redaksi	iii
Topik:	
☞ Karakteristik Nelayan Kecil dalam Ketahanan Pangan Ikan: Kasus di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara <i>Ary Wahyono</i>	319
☞ Pola Konsumsi Ikan oleh Masyarakat di Desa Hitumesing, Kabupaten Maluku Tengah <i>Ratna Indrawasih</i>	339
☞ Pelayaran Tradisional Orang Buton dan Kebijakan Poros Maritim Indonesia <i>Tasrifin Tahara</i>	353
☞ Poros Maritim: Dalam Kerangka Sejarah Maritim dan Ekonomi Pertahanan <i>Wahyu Wardhana</i>	369
☞ Pengendalian Alih Guna Tanah Sawah ke Nonpertanian di Kabupaten Bandung, Jawa Barat Melalui Peraturan Desa <i>Eliana Sidipurwanti</i>	387
☞ Konflik Agraria Di Indonesia: Catatan Reflektif Konflik Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur <i>Imam Syafi'i</i>	415
☞ Ekonomi Politik Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia: Metode dan Problem <i>Mohammad Hasan Anshori</i>	433
☞ Strategi Penambang Minyak Tradisional di Tengah Meluasnya Kontrol Negara dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia <i>Rio Heykhal Belvage</i>	453
☞ Kehidupan Masyarakat Sekitar Hutan dan Ketahanan Sosial pada Ekologi Hutan yang Berubah <i>Robert Siburian</i>	467
☞ Problematika Prinsip Manajemen Kolaboratif dalam Kerangka Penyelamatan Danau Rawapening <i>Mochammad Nadjib</i>	487
Tinjauan Buku:	
☞ 1969-2015: Cerita Tiga Dekade Politik Perpindahan Masyarakat di Indonesia <i>Anggy Denok Sukmawati</i>	503

PENGANTAR REDAKSI

Dari hari ke hari, dunia semakin renta. Ia menjadi rapuh dan semakin rapuh, bukan hanya oleh usianya tetapi juga oleh beban deritanya yang cukup menderanya. Kerapuhan tersirat begitu tampak di wajah permukaannya. Penurunan kualitas air, bebatuan yang longsor, gunung yang terus digali, hutan yang terus dibabat, dan banjir bandang yang menghanyutkan segala yang dilewatinya menjadi berita dan pemandangan manusia kekinian.

Kerapuhan juga dialami di dalam bumi. Seluruh kandungan mineral dan tambangnya digali dan dibuka, tanpa memedulikan sistem keberlanjutan lingkungan untuk masa depan insani. Ibarat “mengorek aurat bumi”, demikian istilah yang dipopulerkan oleh National Geography, untuk perilaku pengerusakan lingkungan hidup, terus berlangsung bukan hanya memenuhi unsur kebutuhan perut, tetapi juga kerakusan terhadap nilai-nilai material keduniaan. Seringkali dalam banyak kasus, nafsu dan kepentingan politik kekuasaan terlihat jelas dalam hubungannya dengan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Bumi menjadi rapuh, bukan hanya usianya, atau bukan pula oleh perubahan iklim yang seringkali diisukan sebagai faktor dominan ketidakseimbangan alam. Bumi menjadi rapuh, karena beban ekologis yang benar-benar berat ditanggungnya. Pertumbuhan populasi penduduk yang mencapai angka 8 Milyar tentu menuntut pembukaan wilayah-wilayah baru. Dalam konteks Indonesia, jumlah populasi penduduk terus beranjak naik, seolah tanpa rintangan apapun. Wilayah baru untuk permukiman dibuka, baik berasal dari hamparan sawah yang hijau, ataupun hutan belukar penuh keliaran, dan bahkan daerah aliran sungai dimanfaatkan dan pantai pun direklamasi untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal.

Atas nama pembangunan, penggalian sumber daya alam fosil terus dilakukan untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tak tanggung-tanggung, hutan luas sebangun mata memandang dibabat habis terganti hamparan sawit penyerap air tak putus hentinya. Kebutuhan pangan, air, energi, listrik, perumahan, bahkan kebutuhan perang sekalipun, baik dalam skala lokal, nasional, regional ataupun global menjadi pemicu utama dari eksploitasi sumber daya alam besar-besaran. Kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar dimanfaatkan hanya untuk generasi sekarang, dan untuk generasi yang akan datang maka dipersilahkan bagi generasi yang akan datang untuk memikirkannya sendiri, mungkin itulah pengibaratan kondisi eksploitasi sumber daya alam yang ada. Ancaman serius kerusakan lingkungan, serta penurunan kualitas dan jasa lingkungan terus terjadi seiring eksploitasi sumber daya alam yang ada.

Realitas dan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di berbagai wilayah Indonesia dapat menjadi pembelajaran baik dalam merumuskan kembali visi pembangunan nasional berbasiskan sumber daya alam di kemudian hari. Melihat tantangan seperti itulah, maka Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB), Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada terbitan khusus tahun 2016 akhirnya mengambil tema tentang “Pengelolaan Sumber Daya Alam”.

Dari puluhan tulisan yang masuk, dewan redaksi memutuskan untuk mengambil sepuluh tulisan yang dianggap cukup baik mewakili keadaan dan jenis-jenis pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tulisan pertama berjudul: “Karakteristik Nelayan Kecil dalam Ketahanan Pangan Ikan: Kasus di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara”, telah menunjukkan bahwa kontribusi nelayan kecil untuk kebutuhan konsumsi ikan lokal rupanya terpengaruh sejak adanya kebijakan moratorium perikanan tangkap. Saat itu, sebagian nelayan kecil mulai tertarik untuk memasok kebutuhan industri pengolahan hasil ikan, dan hal ini tentu saja mempengaruhi pasokan kebutuhan ikan konsumsi lokal. Kebijakan politik tingkat nasional dalam banyak segi telah memberikan pengaruh besar bagi praktik ketahanan pangan masyarakat dalam konsumsi ikannya.

Tulisan kedua, “Pola Konsumsi Pangan Ikan oleh Masyarakat di Desa Hitumesing Kabupaten Maluku Tengah”, menjelaskan melalui penghitungan seksama antara produksi ikan di Kabupaten Maluku Tengah yang dikonsumsi dengan jumlah penduduk yang ada, maka konsumsi ikan per kapita penduduknya sangat tinggi, jauh di atas rata-rata konsumsi perkapita penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan wilayah permukiman dengan wilayah sumber daya alam hasil laut memungkinkan masyarakat dapat secara mudah mengakses sumber daya ikan dan mendorong lahirnya daya tahan sosial lanjutannya.

Tulisan ketiga, “Pelayaran Tradisional Orang Buton dan Kebijakan Poros Maritim Indonesia” membahas sistem dan dinamika pelayaran tradisional, jaringan pelayaran, perniagaan antarpulau yang dilakukan pelayar Buton yang masih bertahan hingga sekarang. Pengetahuan ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kebijakan Poros Maritim Indonesia yang digaungkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK saat ini.

Tulisan keempat, “Poros Maritim dalam Kerangka Sejarah Maritim dan Ekonomi Pertahanan” menjelaskan adanya hubungan manusia dengan laut, perdagangan maritim sebagai bagian dari dinamika perdagangan, ekonomi antarkawasan, dan munculnya kekuatan baru serta persaingan yang timbul antarkekuatan maritim di era sejarah masa lampau Indonesia. Gagasan poros maritim juga memiliki hubungan erat dengan politik kekuasaan, hubungan internasional, perdagangan maritim, dan aspek keamanan bagi wilayah Indonesia.

Tulisan kelima, “Pengendalian Alih Guna Tanah Sawah ke Nonpertanian di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Desa”, menunjukkan bahwa luas tanah sawah di Bandung untuk peta lahan hijau abadi ikut terganggu dengan pertumbuhan penduduk di sekitarnya. Beberapa peraturan untuk pengendalian alih guna tanah sawah sebenarnya telah dilakukan, namun gangguan terhadap lahan hijau terus dilakukan oleh penduduk dan sektor industri. Oleh karena itulah, upaya untuk mendorong lahirnya Perda Lahan Abadi untuk Pertanian, agar alih guna tanah sawah tidak mengganggu produksi padi di Kabupaten Bandung terus dilakukan pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat.

Tulisan keenam, “Konflik Agraria di Indonesia: Catatan Reflektif Konflik Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur”, menunjukkan permasalahan konflik agraria di sektor perkebunan yang merepresentasikan buruknya sistem tata kelola SDA di Indonesia. Berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh tumpang tindih kewenangan dan kebijakan dari level pusat hingga daerah menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran hukum seperti pemalsuan dokumen, kriminalisasi, dan pengrusakan fasilitas. Di saat bersamaan, negara cenderung memberikan fasilitas yang memudahkan laju ekspansi perusahaan perkebunan sawit yang ekstraktif. Hal ini yang mempercepat laju kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan marginalisasi kelompok masyarakat adat. Fenomena ini menjadi gambaran di wilayah-wilayah perkebunan sawit lama dan pembukaan baru.

Tulisan ketujuh, “Ekonomi Politik Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia: Metode dan Problem”, telah menunjukkan adanya tiga model mekanisme yang memfasilitasi proses ekonomi politik dalam proses penerbitan IUP, yaitu pemilukada, tahapan prosedural penerbitan IUP, dan setoran rutin. Tiga mekanisme ini menambah deret panjang bekerjanya mekanisme yang tidak sehat, yaitu balas budi politik, problem loyalitas, problem kroni dan koalisi dan problem *wani piro* (berani bayar berapa). Dari sisi ekonomi politik, maka penerbitan IUP akan berkaitan erat dengan merebaknya korupsi di sektor pertambangan.

Tulisan kedelapan, “Strategi Penambang Minyak Tradisional di Tengah Meluasnya Kontrol Negara dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia” menunjukkan tentang strategi masyarakat penambang dalam menjaga kelangsungan usahanya di tengah meluasnya kontrol negara terhadap sumber daya alam yang berdampak pada merosotnya akses masyarakat terhadap usaha penambangan di daerahnya.

Tulisan kesembilan, “Kehidupan Masyarakat Sekitar Hutan dan Ketahanan Sosial pada Ekologi Hutan yang Berubah”, memberi gambaran berbagai jenis respon yang dilakukan masyarakat terhadap perubahan

ekologi hutan di Kabupaten Gunung Mas. Respon ini sangat menentukan tingkat ketahanan sosial masyarakat yang bermukim di sekitar hutan tersebut.

Terakhir adalah tulisan berjudul “Problematika Prinsip Manajemen Kolaboratif dalam Kerangka Penyelamatan Danau Rawapening.” Tulisan ini mendiskusikan dampak pemanfaatan secara bebas dan tidak terkendali dari berbagai pemangku kepentingan di Danau Rawapening. Perubahan paradigma pengelolaan, khususnya paradigma kolaboratif menjadi sebuah tawaran untuk menyelamatkan Danau Rawapening.

Sepuluh tulisan ini menarik untuk dibaca dan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Harapannya, bahwa tulisan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penting dari berbagai rumusan kebijakan pembangunan yang diajukan oleh pemerintah. Semoga bermanfaat.

**KARAKTERISTIK NELAYAN KECIL DALAM KETAHANAN PANGAN
IKAN: KASUS DI KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA**

Ary Wahyono

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI
ary318@gmail.com

Abstrak

Stigma nelayan kecil tidak memiliki kontribusi pada ketahanan pangan tidak selalu benar. Nelayan kecil adalah satu-satunya kelompok sosial yang memberikan asupan makanan dengan mudah untuk penyediaan kebutuhan ikan konsumsi. Paling tidak kebutuhan ikan konsumsi untuk keluarganya terpenuhi. Hal ini tidak terjadi pada perikanan tangkap skala besar yang lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekspor ikan. Pemerintah Indonesia tampaknya lebih memilih untuk meningkatkan ekspor hasil perikanan dibandingkan dengan memikirkan kebutuhan konsumsi ikan dalam negeri. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan kepada rumah tangga nelayan kecil secara terbatas di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi nelayan kecil untuk kebutuhan konsumsi ikan lokal terpengaruh sejak adanya kebijakan moratorium perikanan tangkap karena sebagian nelayan kecil mulai tertarik untuk memasok kebutuhan industri pengolahan hasil ikan. Hal ini tentu saja mempengaruhi pasokan kebutuhan ikan konsumsi lokal.

Kata kunci: nelayan kecil; ketahanan pangan; konsumsi ikan.

**POLA KONSUMSI IKAN OLEH MASYARAKAT
DI DESA HITUMESING, KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Ratna Indrawasih

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
ratnapmb@yahoo.co.id

Abstrak

Besarnya potensi sumber daya ikan di Provinsi Maluku menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, yang menunjang kebutuhan pangan ikan penduduk Indonesia. Hal itu menjadikan konsumsi ikan perkapita penduduk Maluku tinggi secara nasional. Tulisan ini bertujuan mendiskusikan bagaimana hubungan antara jumlah produksi ikan yang tersedia dengan konsumsi perkapita penduduknya dan bagaimana pula pola konsumsi ikan masyarakat Hitumesing. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan di Kabupaten Maluku Tengah. Data diperoleh melalui kuesioner dan pedoman wawancara. Selain itu, juga dengan diskusi kelompok terfokus dan observasi juga dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika membandingkan produksi ikan di Kabupaten Maluku Tengah yang dikonsumsi dengan jumlah penduduknya, hasil yang diperoleh menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hasil tersebut di atas rata-rata konsumsi perkapita penduduk Desa Hitumesing. Padahal, Desa Hitumesing merupakan desa pesisir yang mempunyai kemudahan akses sumber daya ikan. Hal itu disebabkan oleh perilaku nelayan Desa Hitumesing yang cenderung berorientasi pasar atau ekonomi dan bukan mengonsumsi ikan itu sendiri.

Kata kunci: pola konsumsi, pangan ikan, Maluku Tengah

PELAYARAN TRADISIONAL ORANG BUTON DAN KEBIJAKAN POROS MARITIM INDONESIA

Tasrifin Tahara
Universitas Hasanuddin
tasrifin.tahara@yahoo.co.id

Abstrak

Kelangsungan tradisi bahari orang Buton hingga kini merupakan kekuatan budaya yang penting dikaji, tidak hanya karena latar historisnya, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai kehidupan bagi mereka dalam menata masa depannya. Tradisi ini telah melampaui berbagai zaman dan generasi, dengan segala tantangannya, telah mengukuhkan orang Buton sebagai suku bangsa bahari Indonesia, bersama dengan suku bangsa lainnya yakni Bajo, Bugis-Makassar, Mandar, dan Madura. Artikel ini membahas sistem dan dinamika pelayaran tradisional, jaringan pelayaran, perniagaan antarpulau yang dilakukan pelayar Buton yang masih bertahan hingga sekarang. Tulisan ini menarasikan kebudayaan pelayar pulau terdepan di Buton (Pulau Batuatas) dalam mempertahankan hidup dan tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun. Selain itu, harapan atas kebijakan Poros Maritim Indonesia yang digaungkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK juga dielaborasi.

Kata kunci: pelayaran, tradisional, Poros Maritim Indonesia

POROS MARITIM: DALAM KERANGKA SEJARAH MARITIM DAN EKONOMI PERTAHANAN

Wahyu Wardhana
Pusat Studi Sumber Daya Ekonomi Pertahanan – Universitas Pertahanan Indonesia
wahyu_w016@yahoo.com

Abstrak

Lautan dan samudra merupakan sumber daya yang tak terbatas di mana lautan telah digunakan sebagai sarana transportasi, sumber makanan, pertambangan dan perdagangan laut serta medium proyeksi kekuatan suatu negara. Nilai penting laut dan samudera di era globalisasi ditandai dengan meningkatnya lalu lintas perdagangan laut. Sejarah membuktikan bahwa negara yang memilih lautan untuk memajukan kepentingan, mereka menjadi kuat secara politik dan makmur secara ekonomi. Indonesia sebagai kekuatan maritim yang besar telah mendominasi pusat jalur sutera di abad ke-10 sampai abad ke-14. Gagasan poros maritim Indonesia saat ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat kekuatan nasional dan kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas kemaritiman. Tulisan ini menjelaskan poros maritim dari perspektif sejarah maritim dan perspektif ekonomi pertahanan. Kerangka teoritis dari A.T Mahan, J.S. Corbett, J.R. Hill dan Ken Booth digunakan untuk memahami poros maritim dalam perspektif ekonomi pertahanan. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara bertautan di mana sejarah maritim tidak akan membantu tanpa pedoman teoritis, sedangkan teori memerlukan catatan sejarah sebagai bukti empiris untuk menggambarkan pola yang ada sebagai kerangka awal bagi pemahaman poros maritim Indonesia.

Kata kunci: ekonomi pertahanan, poros maritim, sejarah maritim.

PENGENDALIAN ALIH GUNA TANAH SAWAH KE NONPERTANIAN DI KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT MELALUI PERATURAN DESA

Eliana Sidipurwanty

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN
eli_purwanty@yahoo.co.id

Abstrak

Luas tanah sawah di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan, karena beralihguna menjadi tanah nonpertanian. Tulisan ini menggunakan studi pustaka untuk menggambarkan alih guna tanah sawah ke nonpertanian dan pengendaliannya di Kabupaten Bandung. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diamanatkan dalam Undang-undang untuk mengendalikan laju penurunan luas tanah sawah belum dilakukan di Kabupaten Bandung, namun sudah ada upaya untuk menetapkannya melalui rapat-rapat koordinasi antarinstansi terkait. Hasil pertemuan adalah kajian tentang luas tanah sawah yang akan ditetapkan menjadi LP2B dan rencana untuk membuat peta lahan hijau abadi. Pengendalian alih guna tanah sawah sebenarnya telah dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, walau belum sepenuhnya mengendalikan alih guna tanah sawah ke nonpertanian. Upaya pengendalian alih guna tanah sawah ke nonpertanian sudah dilaksanakan oleh dua pemerintahan desa melalui Peraturan Desa (Perdes) yaitu Perdes Sangkanhurip No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Kawasan Pertanian Lahan Basah Abadi dan Perdes Sumbersari No. 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Pertanian Lahan Basah. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam mengendalikan alih guna tanah sawah ke nonpertanian melalui Pertimbangan Teknis Pertanahan merupakan salah satu syarat dalam pemberian izin lokasi di Kabupaten Bandung. Upaya selanjutnya adalah mendorong lahirnya Perda Lahan Abadi untuk Pertanian, agar alih guna tanah sawah tidak mengganggu produksi padi di Kabupaten Bandung.

Kata kunci: pengendalian alih guna tanah sawah, peraturan desa, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA: CATATAN REFLEKTIF KONFLIK PERKEBUNAN SAWIT DI KOTAWARINGIN TIMUR

Imam Syafi'i

Pusat Penelitian Politik (P2P)-LIPI
imamsyafii.sej07@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan bahwa permasalahan konflik agraria di sektor perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur merepresentasikan buruknya sistem tata kelola SDA di Indonesia. Berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh tumpang tindih kewenangan dan kebijakan dari level pusat hingga daerah menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran hukum seperti pemalsuan dokumen, kriminalisasi, pengrusakan fasilitas. Sementara, negara cenderung memberikan fasilitas yang memudahkan laju ekspansi perusahaan perkebunan sawit yang ekstraktif. Hal ini kemudian mempercepat laju kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan marginalisasi kelompok masyarakat adat. Namun demikian, pascarezim otoritarian, munculnya FKKTDM-KT yang diinisiasi oleh DAD memperlihatkan bahwa institusi berbasis komunitas adat mulai memiliki peran dan posisi di dalam tata kelola sumber daya alam di wilayah mereka. Keberadaan FKKTDM-KT yang diperkuat melalui Peraturan Daerah baik di level provinsi maupun kabupaten tidak hanya memperkuat posisi mereka secara kultural juga posisi politik mereka. Hal ini dapat dikatakan sebagai bagian dari respon mereka untuk membangun strategi menghadapi perusahaan besar dan atau negara termasuk di dalamnya upaya-upaya penyelesaian konflik di sektor perkebunan.

Kata kunci: tata kelola sda, konflik perkebunan sawit, dan Masyarakat Adat

EKONOMI POLITIK PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI INDONESIA: METODE DAN PROBLEM

Mohammad Hasan Anshori

Jurusan Sosiologi-Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
mansori_uhm@yahoo.com

Abstrak

Kebijakan Desentralisasi Pascareformasi di Indonesia sejak tahun 1999 secara prinsip dicirikan dengan delegasi kekuasaan secara signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk kekuasaan terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sayangnya, pendelegasian kekuasaan ini tidak disertai dengan persiapan yang seharusnya, seperti berbagi regulasi otoritas pusat dan kapasitas pemerintah daerah. Kondisi tersebut kemudian berdampak munculnya berbagai kasus tumpang tindih IUP. Tulisan ini mengkaji interaksi dinamis antara faktor-faktor ekonomi dan politik yang menjadi sumber konkret tumpang tindih IUP. Tulisan ini menunjukkan adanya tiga model mekanisme yang memfasilitasi proses ekonomi politik dalam proses penerbitan IUP, yaitu pemilukada, tahapan-tahapan prosedural penerbitan IUP, dan setoran rutin. Selain itu, empat masalah umum yang teridentifikasi menjadi fondasi bekerjanya mekanisme tersebut, yaitu balas budi politik, problem loyalitas, problem kroni dan koalisi dan problem *wani piro* (berani bayar berapa). Ekonomi politik penerbitan IUP berkaitan dengan merebaknya korupsi di sektor pertambangan. Data studi ini secara primer diambil dari berbagai wawancara semi-terbuka dengan berbagai informan dan data-data sekunder, termasuk laporan dan dokumen publik dan pemerintah, publikasi akademis, dan surat kabar serta majalah, baik nasional maupun lokal.

Kata kunci: pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP), ekonomi politik, desentralisasi

STRATEGI PENAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI TENGAH MELUASNYA KONTROL NEGARA DALAM KONTEKS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

Rio Heykhal Belvage

Sekolah Pascasarjana Antropologi Universitas Gadjah Mada
rio.belvage@gmail.com

Abstrak

Tambang minyak adalah salah satu sektor industri ekstraktif bernilai ekonomi tinggi. Di Desa Sewu Jati yang terletak di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, terdapat tambang minyak bekas perusahaan Belanda. Sejak perusahaan tersebut melakukan kapitalisasi terhadap sumber minyak di Sewu Jati, yang kemudian dilanjutkan oleh rezim elit desa dan koperasi, masyarakat terus mengalami peminggiran. Berkaitan dengan meluasnya kontrol negara terhadap sumber daya alam yang berdampak pada merosotnya akses masyarakat terhadap usaha penambangan di daerahnya, tulisan ini menggambarkan strategi masyarakat penambang dalam menjaga kelangsungan usahanya.

Kata kunci: tambang minyak, kontrol negara, strategi bertahan

KEHIDUPAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DAN KETAHANAN SOSIAL PADA EKOLOGI HUTAN YANG BERUBAH

Robert Siburian

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
robertsdes1970@gmail.com

Abstrak

Masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dipengaruhi oleh perubahan ekologi hutan, terutama mereka yang tergantung pada sumber daya hutan. Eksistensi kehidupan mereka akan terganggu jika hutan mengalami kerusakan. Sebab, jika hutan rusak berarti mereka kehilangan sumber daya yang mendukung kehidupan mereka. Mereka yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekologi hutan berarti memiliki ketahanan sosial yang memadai. Sebaliknya, ketahanan sosial yang rendah menunjukkan kerentanan mereka terhadap perubahan ekologi hutan. Terkait dengan itu, tulisan ini mencoba menjelaskan perubahan ekologi hutan yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas dan respon yang dilakukan masyarakat terhadap perubahan itu. Jenis respon yang dilakukan menentukan tingkat ketahanan sosial masyarakat yang bermukim di sekitar hutan tersebut. Data yang dikumpulkan untuk menyusun tulisan ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan pada pertengahan 2015.

Kata kunci: komunitas, ketahanan sosial, ekologi hutan

PROBLEMATIKA PRINSIP MANAJEMEN KOLABORATIF DALAM KERANGKA PENYELAMATAN DANAU RAWAPENING

Mochammad Nadjib

Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI
mochammadnadjib13@gmail.com

Abstrak

Interaksi penduduk dan lingkungan yang kompleks dapat ditemukan pada ekologi perairan Rawapening. Rawapening adalah suatu kawasan danau yang memiliki potensi multifungsi, diantaranya adalah perikanan, irigasi, pembangkit listrik dan pariwisata. Pemanfaatan secara multifungsi tersebut bisa saling mendukung, tetapi dapat pula bersifat *trade off* bila dilakukan secara tidak terkendali. Tulisan ini mendiskusikan permasalahan *trade off* sebagai dampak dari pemanfaatan secara bebas dan tidak terkendali antara berbagai pihak di Danau Rawapening. Sumber data ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan tentang “Optimalisasi Multifungsi Perairan Umum Daratan dalam Pengembangan Ekonomi Daerah: Kasus Danau Rawapening”. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* dan observasi lapangan di kawasan Danau Rawapening. Implikasi dari pemanfaatan secara bebas atas Danau Rawapening terjadi karena polarisasi kepentingan, sehingga berdampak timbulnya degradasi lingkungan. Untuk itu diperlukan perubahan paradigma pengelolaan dari polarisasi kepentingan menjadi paradigma kolaborasi, sehingga segenap kegiatan ekonomi yang menjadi penyangga kawasan Rawapening dapat dikelola secara komprehensif.

Kata kunci: danau rawapening, multifungsi ekonomi, degradasi lingkungan, polarisasi kepentingan, paradigma kolaborasi

